

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

1. Dahrendorf memandang bahwa dengan adanya status sosial di dalam masyarakat sumber konflik yaitu: adanya benturan sosial ekonomi, kepentingan antara kelompok WTS dengan lembaga rehabilitasi sosial UPT RSBKW, serta kekuasaan yaitu (pemegang otoritas dan bukan pemegang otoritas) sehingga menimbulkan perubahan sosial pada aspek sosial ekonomi yang dialami kelompok WTS yaitu:
 - a. Kerentanan sosial ekonomi pada aspek pekerjaan menjadi WTS merupakan pilihan sebagai mata pencaharian sehingga selama menjalani rehabilitasi mereka kehilangan pekerjaannya.
 - b. Kerentanan sosial ekonomi pada aspek pendapatan menunjukkan bahwa dengan bekerja menjadi WTS dapat memperoleh penghasilan yang dirasa cukup bagi kehidupan WTS maka selama menjalani rehabilitasi tentunya mereka tidak memiliki sumber pendapatan.
 - c. Kerentanan sosial ekonomi pada aspek pendapatan menunjukkan bahwa dengan bekerja menjadi WTS dapat memperoleh penghasilan yang dirasa cukup bagi kehidupan WTS maka selama menjalani rehabilitasi tentunya mereka tidak memiliki sumber pendapatan.

- d. Kerentanan sosial ekonomi pada aspek kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan hidup merupakan kondisi yang terus berjalan dan tidak terhindarkan baik kebutuhan pokok atau mewah dan pemenuhan kebutuhan pribadi ataupun sosial.
2. Dalam langkah mengatasi kerentanan sosial ekonomi kelompok WTS selama menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi sosial, ditemukan konsensus atau kerjasama kelompok in-group yang terjalin antara WTS dengan teman, keluarga, kekasih, bahkan geromo untuk mengatasi kerentanan sosial ekonomi dan kelangsungan hidup dalam melawan kebijakan out-group atau pihak UPT RSBKW selaku pembuat kebijakan yang merugikan kelompok WTS.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka saran yang ingin diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat khususnya generasi muda hendaknya mulai dari sekarang supaya lebih membentengi diri dengan keimanan dan ilmu agama serta memperkuat pendidikan karakter agar tidak mudah terjerumus pada pergaulan tanpa batas.
2. Bagi pemerintah hendaknya lebih menggiatkan program pelatihan dan pemberdayaan keterampilan kerja secara menyeluruh terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Selain itu pemerintah perlu memberikan sosialisasi tentang dampak negatif dari tindak pelacuran.

3. Bagi lembaga rehabilitasi sosial Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita supaya dapat mengupayakan jalan tengah bagi wanita tuna susila dalam kerentanan sosial ekonominya selama menjalani proses rehabilitasi di samping memberikan bantuan sosial pasca keluar dari lembaga rehabilitasi sosial.